

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Untuk memelihara kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih mempertahankan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan. Adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam membiayai rumah tangga sendiri, dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Dengan perubahan yang mendasar tersebut, maka dampak yang akan dirasakan oleh pemerintah daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan struktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama menyangkut kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan memiliki akuntabilitas. Sumber daya manusia yang diperlukan bukan hanya memiliki keterampilan dan kemampuan professional dibidangnya, tetapi juga memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi serta pengabdian kepada masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mempunyai dua pengaruh nyata yaitu: Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat ini dapat berwujud dukungan masyarakat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan oleh perencana. Atau berwujud keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan hasil- hasil pembangunan.

Kedua, memperbaiki alokasi faktor-faktor produksi dengan mendesentralisasikan pengambilan keputusan kedaerah. Perbaikan pada alokasi faktor-faktor produksi itu muncul karena adanya efisiensi teknis dalam

pengambilan keputusan karena tidak perlu meminta persetujuan dari pemerintah pusat, dan efisiensi ekonomis yang berupa terciptanya alokasi faktor-faktor produksi yang sesuai preferensi masyarakat dengan daerah pengambilan keputusan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kota Bukittinggi yaitu: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada dana dan bantuan dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat ke daerah melalui proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD dengan total penerimaan daerah dibanding besarnya subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, restribusi daerah laba bersih dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa penyebab ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat antara lain adalah kurangnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan, artinya semua pajak utama dan yang paling produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pusat, hanya sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan walaupun jumlahnya

beragam; bersifat politis, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatis; dan faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan fiskal daerah adalah kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok (*block grants*) dan spesifik (*specific grants*). Perbedaan utama dari subsidi blok dan subsidi spesifik adalah terlihat dari jumlah dan cara pengelolaan, subsidi blok dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pemerintahan pusat dan daerah tidak punya keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut.

Apabila dilihat dari sisi jumlah bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah bantuan spesifik jauh lebih besar daripada subsidi blok. Jadi pemerintah pusat hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Upaya mobilisasi dana dari sumber-sumber daerah sendiri terutama yang berasal dari PAD sangat penting mengingat masih besarnya ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat.

Kemampuan daerah dalam mobilisasi PAD dapat diukur melalui: a. peranan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin atau sering disebut dengan Indeks Kemampuan Rutin (IKR), b. Perbandingan antara PAD dengan Pendapatan Daerah nonmigas pada masing-masing daerah.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi, Mahsun,(2009). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya.

Jadi, analisis kinerja keuangan DPKAD Kota Bukittinggi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPKAD Kota Bukittinggi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan DPKAD Kota Bukittinggi, maka diambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, akan timbul beberapa permasalahan. Anggaran adalah rencana keuangan. Rencana keuangan Pemda adalah APBD, yang isinya rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang namanya rencana, tentu tidak pasti, tentu ada asumsi-asumsi. Pengalokasian sumberdaya dalam bentuk belanja berupa kegiatan/program dilakukan melalui proses pembuatan keputusan yang cukup rumit, yang sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Ada masalah politis ketika berbicara prioritas alokasi dan masalah ekonomi ketika bicara sumber pendanaannya. Menelaah keuangan di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi pemerintah daerah selama ini, khususnya pada DPPKA Kota Bukittinggi yaitu:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
- b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber

asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada. Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam : menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, dan Analisis *Trend* untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat kemandirian, efektivitas dan efisiensi Kota Bukittinggi dalam mengelola keuangannya.

Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi.

1.3.Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis berusaha untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan DPKAD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana Kinerja keuangan DPKAD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan DPKAD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian?

4. Bagaimana Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian pada DPKAD Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sampai dengan 2014 ?

1.4. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Analisis kinerja keuangan yang dilihat dari aspek rasio efektivitas, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio kemandirian, serta analisis *trend* untuk rasio efektivitas, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio kemandirian di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sampai dengan 2014”.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan DPKAD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Rasio Efektivitas.
2. Kinerja keuangan DPKAD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.
3. Kinerja keuangan DPKAD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
4. Perkiraan kinerja keuangan melalui Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian pada DPKAD

Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sampai dengan 2014.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada DPKAD Kota Bukittinggi dengan menerapkan rasio Efektivitas, rasio Pajak Daerah terhadap PAD, rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan DPKAD Kota Bukittinggi ditinjau dari teori Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian, Analisis *Trend* Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan DPKAD Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian, Analisis *Trend* Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan DPKAD Kota Bukittinggi.

1.7.Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas dari isi penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian identifikasimasalah, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang landasan teoritis yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini antara lain dibahas tentang sumber pendapatan daerah, Kinerja Keuangan, rasio kinerja, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait kinerja keuangan, sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan yang dikemukakan dalam penulisan ini.

BAB III : Metode Penelitian

Berisikan paparan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini, mencakup jenis penelitian, lingkup penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data yang telah dikumpulkan. Sekaligus analisis hasil dari pembahasan data tersebut.

BAB V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.

